



RASIONALITAS PERDANA MENTERI BORIS JOHNSON MENYEPAKATI PERJANJIAN DAGANG INGGRIS-UNI EROPA PASCA REFERENDUM BREXIT

Hafid Adim Pradana¹, Syelda Titania Sukarno Putri²

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Malang

Email Korespondensi: adimhafid@umm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini disusun untuk menjelaskan tindakan rasional Boris Johnson menyepakati perjanjian dagang pasca Brexit. Setelah terjadinya referendum tahun 2016 dan mundurnya David Cameon dari kursi perdana menteri, kedudukannya digantikan oleh Theresa May. Pada masa Theresa May Brexit juga tidak kunjung mendapat penyelesaian sehingga May mengundurkan diri dan digantikan oleh Boris Johnson. Pada awal masa jabatannya, Johnson berupaya untuk menyelesaikan Brexit dengan jalan apapun termasuk tanpa kesepakatan, namun, hal tersebut begitu berbeda ketika tahun 2020, Johnson justru mengambil tindakan untuk menyepakati perjanjian dagang pasca Brexit dengan Uni Eropa setelah proposal Brexitnya beberapa kali ditolak oleh parlemen Inggris. Maka dari itu, penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, telaah Pustaka dari jurnal, website resmi, dan buku yang menghasilkan bahwa rasionalitas yang dilakukan Johnson bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian nasional Inggris dan menyelamatkan eksistensi kepemimpinan Johnson sebagai perdana Menteri Inggris. Johnson kemudian dihadapkan pada persoalan Brexit yang berlarut-larut sehingga ia dihadapkan pada berbagai alternatif kebijakan dari Uni Eropa dan Parlemen Inggris. Setelah menimbang berbagai alternatif kebijakan yang ada, Johnson berhasil menetapkan kebijakan dagang pasca Brexit yang dinamakan Withdrawal Agreement Bill pada Desember 2020 yang berisi delapan poin penting kerjasama dagang Brexit.

Kata Kunci: *Boris Johnson, Brexit, Pilihan Rasional, Uni Eropa*

PENDAHULUAN

Pada Juni tahun 2016 Inggris telah berhasil mengadakan referendum Brexit. Hasil referendum tersebut menunjukkan bahwa 52% masyarakat Inggris memilih untuk meninggalkan keanggotaan Uni Eropa, sedangkan 48% sisanya memilih untuk tetap menjadi bagian dari keanggotaan Uni Eropa. Referendum Brexit dilakukan pada masa pemerintahan David Cameron. Tidak lama setelah pelaksanaan referendum Brexit, Cameron mundur dari kursi Perdana Menteri Inggris. Pengunduran diri Cameron disebabkan karena Cameron sendiri sebenarnya masih menginginkan Inggris untuk tetap menjadi bagian dari Uni Eropa. Posisi David Cameron kemudian diduduki oleh Theresa May. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, May mencoba untuk merealisasikan Brexit melalui berbagai proses negosiasi dengan Uni Eropa (Fransisca, Trihastuti, 2017). Terdapat sepuluh lampiran draft yang menjadi hasil dari perjanjian referendum Brexit diantaranya (Andrias, 2018), yang pertama, yakni berupa protokol dalam mempertahankan perbatasan terbuka antara Uni Eropa dan Inggris di pulau Irlandia yang biasanya dikenal sebagai “backstop Irlandia”. Draft kedua, mencakup pengaturan mengenai wilayah pabean umum untuk beroperasi antara Uni Eropa dan Inggris, hingga pada solusi teknis yang dapat ditemukan untuk memberikan perbatasan terbuka serta kebijakan pabean independen. Draft ketiga, berupa operasi wilayah pabean bersama. Draft keempat, mencakup tata pemerintahan yang sesuai baik di bidang perpajakan, perlindungan lingkungan, standar ketenagakerjaan dan sosial, bantuan negara, persaingan, serta usaha milik negara. Draft kelima sampai draft kedelapan meliputi ketentuan yang relevan dengan hukum Uni Eropa. Kerangka proses draft kesembilan dan kesepuluh terbentuk dari bagian utama draft. Namun, Theresa May menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 2019, hal tersebut menyisakan Brexit yang tanpa keputusan yang jelas ditangan Theresa May (Andrias, 2018). Keputusan tersebut ia ambil setelah ia didesak oleh internal Partai Konservatif. Oleh karena itu tidak lama kemudian, terjadilah pemilihan Perdana Menteri baru di Inggris, yang kemudian dimenangkan oleh Boris Johnson (Mashita, 2017).

Keputusan Inggris dalam menyepakati perjanjian dagang yang telah dilakukan oleh Boris Johnson menjelaskan mengenai potensi hasil negosiasi antara Inggris dan pihak Uni Eropa dalam sektor perdagangan, setelah sebelumnya proposal Brexit Boris Johnson ditolak oleh Parlemen Inggris karena Johnson memasukkan beberapa poin proposal Brexit milik Theresa May yang tidak disetujui oleh parlemen. Dorongan internal yang datang dari parlemen itulah membuat Johnson memfokuskan proposalnya pada perjanjian dagang pasca Brexit dengan Uni Eropa, sehingga pada 24 Desember 2020, parlemen dan juga Uni Eropa telah menyetujui proposal Brexit Boris Johnson dan diresmikan sebagai kebijakan pasca Brexit secara resmi. Memilih untuk merundingkan kesepakatan baru artinya pemerintah Inggris harus dapat membuat para petinggi Uni Eropa menekan pakta-pakta perdagangan baru (John Memanus, 2017).

Sebelumnya, Johnson terus melakukan usahanya untuk menekan Uni Eropa supaya Brexit tidak mengalami penundaan lagi. Salah satu klausul kesepakatan yang ditawarkan oleh Boris Johnson dan telah membuat perundingan Brexit buntu yaitu, perbatasan antara Irlandia Utara yang dikuasai Inggris dan anggota Uni Eropa. Johnson juga berusaha mengadakan pemungutan suara bagi anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatannya sebelum mengajukan legislasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan Brexit dalam hukum Inggris (Khairul, Ali, 2017). Hal tersebut ia lakukan setelah anggota parlemen memaksanya untuk

membatalkan pemungutan suara pada kesepakatan Brexit di parlemen Inggris dan meminta Uni Eropa untuk menunda Brexit selama tiga bulan meskipun parlemen Inggris telah menyetujui undang-undang kesepakatan penarikan diri (withdrawal agreement bill).

Terlepas dari semua usaha yang telah dilakukan oleh Johnson mengenai pergeseran Inggris yang mandiri dan berdaulat semua ia lakukan untuk mempercepat hasil keputusan supaya Inggris benar-benar keluar dari keanggotaan Uni Eropa secepatnya (Khairul, Ali, 2017). Semua upaya yang telah ia lakukan tersebut akhirnya membuahkan keputusan resminya Inggris keluar dari Uni Eropa pada 1 Februari tahun 2020. Johnson, dalam pidatonya, berjanji akan menyatukan dan mendorong kemajuan bagi negaranya (Nanda, Permata, 2017). Oleh karenanya, telah diperoleh kesepakatan baru (Withdrawal Agreement Bill) dari hasil perundingan antara Inggris dan Uni Eropa pasca persoalan Brexit ini usai diantaranya yaitu dengan delapan poin penting. Pertama, Kesepakatan Tarif (Tariff Agreement). Perjanjian ini berisikan pengenaan nol tarif atau kuota (zero tariff) kepada segala jenis barang yang diproduksi baik di Inggris ataupun Uni Eropa. Meski begitu komoditi ekspor Inggris tetap harus mematuhi standarisasi keselamatan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, serta dengan mengikuti regulasi tentang produk yang diproduksi menggunakan parts buatan dari luar kawasan Inggris dan Uni Eropa.

Kedua, Sengketa. Inggris menolak segala peran serta tidak akan melibatkan diri dalam Pengadilan Uni Eropa. Sengketa yang ada akan langsung ditangani oleh WTO atau pengadilan arbitrase ad hoc. Ketiga, Kesepakatan mengenai perikanan. Kapal-kapal nelayan Uni Eropa yang selama ini melaut di perairan Inggris yang sangat kaya akan hasil laut harus melepas kuota mereka sebesar 25 persen. Keempat, Kesepakatan subsidi. Pembentukan otoritas independen dilakukan oleh Inggris guna menjadikan UU Persaingan untuk menandingi peraturan mengenai Level Playing Field yang dibuat oleh Komisi Eropa dengan tujuan mencegah perusahaan Inggris untuk memanipulasi kompetitor mereka di Eropa dengan pemberian subsidi maupun imbalan tenaga kerja yang tidak sesuai standar. Kelima, Kesepakatan keamanan. Inggris dan Uni Eropa tetap terbuka mengenai sharing data terkait DNA, sidik jari, dan informasi penumpang seperti yang dulu dilakukan sebelum Brexit. Inggris juga akan tetap bekerjasama dengan Europol dalam hal keamanan. Keenam, Bea Cukai. Sistem baru akan diterapkan untuk sektor bisnis, serta ekspor & impor diseluruh wilayah. Barang-barang yang masuk ke Inggris akan diperiksa secara ketat, begitu juga jika Inggris ke negara-negara Eropa lainnya.

Ketujuh, Kesepakatan mengenai dokumen izin masuk. Masyarakat Inggris dan masyarakat dari negara Eropa lainnya tidak lagi bebas untuk menetap dan bekerja di masing-masing wilayah. Kesepakatan ini juga berlaku para warga negara dengan visa bisnis. Begitupun dengan para seniman yang akan menggelar event pertunjukan mereka memerlukan visa. Kedelapan, Kesepakatan mengenai backstop. Persoalan mengenai backstop pada masa Boris Johnson telah dihapuskan. Johnson juga menetapkan bahwa pembangunan tembok pembatas antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia ditiadakan, Republik Irlandia adalah wilayah yang masih menjadi bagian dari keanggotaan di Uni Eropa, sedangkan Irlandia Utara masih tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris. Itu semua dilakukan oleh Johnson demi kelancaran sistem perdagangan antar wilayah.

Urgensi penelitian ini menekankan tentang keputusan Inggris dalam menyepakati perjanjian dagang dibawah pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson yang berusaha keras dalam menyikapi Brexit semenjak meningkatnya

jumlah demonstrasi dan gerakan penolakan terhadap Brexit. Aksi pertama terjadi pada 23 Maret 2019 yang bertajuk 'Put It To The People' dan yang kedua terjadi pada 19 Oktober 2019 dengan tajuk 'Let Us Be Heard' oleh karenanya situasi untuk mencapai sepakat dalam Brexit semakin sulit. Sehingga didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa Boris Johnson mengambil keputusan untuk menyepakati perjanjian dagang pasca Brexit.

TEORI DAN KONSEP

Rational Choice Theory

Dalam penulisan *paper* ini, penulis menggunakan teori *Rational Choice Theory* guna menjawab rumusan masalah. *Rational Choice Theory* atau Teori pilihan rasional memiliki asumsi dasar bahwa setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Demi tercapainya kepentingan nasional tersebut, negara yang umumnya dipimpin oleh kepala pemerintahan selaku pengambil kebijakan, berupaya untuk bertindak rasional. Artinya, pengambil kebijakan suatu negara selalu berusaha untuk memilih opsi terbaik dari setiap pilihan alternatif guna memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost yang diterima.

Menurut Charles Kegley dan Shannon Blanton, ada tiga poin penting mengenai teori pilihan rasional, pertama, teori pilihan rasional bersifat individu, yaitu dari hasil-hasil sosial dan politik yang dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu. Kedua, aktor negara berusaha memaksimalkan kepentingannya, hal tersebut dilakukan oleh aktor dengan mengambil suatu pilihan yang akan membawa hasil maksimal terhadap pencapaian kepentingannya. Ketiga, teori pilihan rasional menspesifikkan sikap dari aktor terhadap kendala tertentu. Menurut Kegley dan Blanton, teori pilihan rasional merupakan alat untuk membuat kesimpulan secara logis tentang bagaimana seorang individu pengambil kebijakan dalam membuat keputusan.

Proses pembuatan keputusan atau kebijakan tersebut memiliki empat tahapan penting yaitu, pertama, *problem recognition and definition*, yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi secara spesifik. Ketika gagal dalam mengidentifikasi permasalahan secara spesifik, maka aktor pembuat kebijakan akan mengambil banyak tindakan atau bertindak terlalu sedikit didalam menanggapi sebuah permasalahan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan akan mengidentifikasi permasalahan dengan jelas dan menentukan kebijakan rasional yang diambil oleh negara sebagai solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan.

Pembuat kebijakan pertama kali akan melakukan identifikasi permasalahan dan karakteristiknya dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang saling berkaitan. Selanjutnya, *goal selection*, yaitu setelah mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi, aktor negara pengambil solusi melalui kebijakan yang diambil. Solusi yang diambil tersebut akan membentuk suatu kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Solusi juga akan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai, sesuai dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sehingga, hal ini menjadi penting untuk diketahui terlebih dahulu. Pengambil kebijakan mengidentifikasi keseluruhan dari nilai dan kepentingan-kepentingan yang ada untuk mencapai tujuan suatu negara tersebut.

Berikutnya, *identification of options and alternatives*, yaitu para pengambil kebijakan suatu negara akan menentukan berbagai solusi dan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang mana tindakan dalam hal

ini berbentuk kebijakan. Kemudian, suatu negara membutuhkan beberapa kebijakan alternatif (Pilihan kebijakan – kebijakan), sehingga dapat memilih dan memaksimalkan tujuan dan kepentingan negara tersebut. Selanjutnya, yang terjadi adalah alternatif kebijakan ini memasuki tahap pertimbangan untung ruginya.

Hal yang menjadi penentu dipilihnya suatu kebijakan dari alternatif kebijakan adalah kemampuan kebijakan tersebut dalam merubah kondisi dan situasi permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga, kedepannya negara tersebut dapat menghadapi masalah tersebut dengan lebih baik. Alternatif kebijakan yang diambil dari negara yaitu merupakan suatu kebijakan yang dianggap tidak terlalu menguntungkan, akan tetapi kebijakan tersebut dapat mengamankan kepentingan minimum seperti keamanan, ekonomi, dan perlindungan wilayah negara, sehingga negara tidak mengalami kerugian yang jauh lebih besar.

Terakhir, yaitu choice. Pada tahap ini, pembuat kebijakan suatu negara akan memilih salah satu dari berbagai alternatif kebijakan yang ada. Pilihan tersebut berdasarkan kemungkinan maksimum dari suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara. Kebijakan yang dipilih dari alternatif kebijakan, dianggap sebagai suatu solusi untuk mencapai tujuan negara tersebut. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, kebijakan yang diambil tidak harus selalu memberikan keuntungan maksimal bagi negara tersebut. Kemudian, jika para pembuat kebijakan berada dalam situasi dan kondisi internasional yang mana tidak dapat mengambil kebijakan yang ingin dicapai (kebijakan yang mencapai kepentingan maksimal), maka para pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang setidaknya dapat mengamankan kepentingan negara walaupun sangat minimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai rasionalitas Perdana Menteri Boris Johnson menyepakati perjanjian dagang Inggris-Uni Eropa pasca referendum Brexit ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan melakukan berbagai tinjauan dan pencarian data dari berbagai literatur yang relevan. Teknik analisis data dalam tulisan ini adalah dengan teknik analisis data Mile dan Huberman yakni pengumpulan data, penyeleksian dan reduksi data serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Negosiasi Brexit Inggris-Uni Eropa dalam Pandangan Boris Johnson

Seiring dengan meningkatnya persiapan mengenai Brexit pada masa pemerintahan Boris Johnson, hubungan Inggris dengan Uni Eropa juga mulai menjauh, hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan kebijakan Boris Johnson mengenai pengurangan dan pembatasan kehadiran Inggris dalam lembaga dan pengambilan keputusan dalam forum Uni Eropa. Bahkan, Boris Johnson menegaskan bahwa tidak akan lagi kehadiran Inggris dalam beberapa pertemuan yang diadakan oleh Uni Eropa.

Sejak bulan Juli 2019, Inggris telah abstain dalam segala hal kecuali satu suara dalam Dewan Uni Eropa. Pemerintah Inggris dibawah kepemimpinan Boris Johnson juga telah mengonfirmasi bahwa pada Bulan Agustus 2019, Inggris tidak akan lagi mencalonkan anggota untuk Komisi Eropa yang baru.

Johnson memang sosok tokoh representative Inggris yang terus berambisi untuk menyelesaikan Brexit dengan jalan apapun termasuk tanpa kesepakatan yang akan berakibat fatal pada hubungan Inggris dengan Uni Eropa kedepannya, namun hal tersebut tidak sampai terjadi, hingga Inggris resmi keluar dari keanggotaan Uni

Eropa. Namun, meski terbilang keras dalam menyelesaikan persoalan Brexit ini, Johnson tetap memikirkan hubungan kerja sama yang baik antara Inggris dengan Uni Eropa untuk masa yang akan datang seperti yang disampaikan oleh Johnson dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri Inggris (BBC, 2019) :

“...And next, I say to our friends in Ireland, and in Brussels and around the EU, I am convinced that we can do a deal without checks at the Irish border, because we refuse under any circumstances to have such checks and yet without that anti-democratic backstop. And it is of course vital at the same time that we prepare for the remote possibility that Brussels refuse any further to negotiate, and we are forced to come out with no deal, not because we want that outcome, of course not, but because it is only common sense to prepare.”

Dalam berbagai upayanya menyelesaikan persoalan Brexit ini, Perdana Menteri Boris Johnson menekankan bahwa terdahulunya mungkin dapat dikatakan sukses dalam mengatur sektor perekonomian negara namun, permasalahan internal Inggris bukan hanya mengenai bagaimana roda perekonomian nasional bisa sukses tetapi bagaimana kesatuan dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Inggris. Menurut Boris Johnson, keadilan dan kesatuan masyarakat Inggris dapat terlaksana dengan baik apabila rakyat dan negaranya berdaulat.

Boris Johnson kemudian meyakinkan masyarakat Inggris bahwa Inggris merupakan negara yang paling berpengaruh dalam banyak sektor baik dari sektor ekonomi maupun politik internasional, oleh karena itu, keputusan masyarakat Inggris untuk keluar dari keanggotaan merupakan suatu keputusan yang terbaik untuk kepentingan masa depan Inggris. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa ini tentu saja memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan Inggris beserta dengan masyarakatnya. Dalam pidato pertamanya sebagai Perdana Menteri Inggris Johnson menjelaskan bahwa (BBC, 2019) :

“We must now respect to the decision and create a new partnership with our European friends, as warm and as close and as affectionate as possible. And we will do a new deal, a better deal that will maximise the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe, based on free trade and mutual support. Because in the end, Brexit was a fundamental decision by the British people that they wanted their laws made by people that they can elect and they can remove from office.”

Ditengah kondisi Inggris menunggu kepastian referendum yang berjalan hingga berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, Boris Johnson mencoba untuk membuat kebijakan dasar dalam bekerja . Kebijakan dasar tersebut dibuat untuk menyusun strategi pemerintah dan kebijakan sebagai solusi dalam menghadapi masa transisi ini.

Kebijakan dasar tersebut diantaranya terdiri dari : a.) memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat Inggris bahwa Brexit akan benar-benar diselesaikan dan tanpa adanya penundaan lagi. b.) Inggris mulai untuk tidak aktif dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Uni Eropa, sehingga Inggris mulai difokuskan untuk mengambil alih hukum sendiri dan Inggris akan mengakhiri hubungannya dengan pengadilan keadilan Uni Eropa. c.) Inggris dibawah Boris Johnson akan menjamin kesepakatan yang berlaku untuk seluruh wilayah di Inggris seperti Skotlandia, Irlandia Utara, dan lainnya. d.) menghapuskan backstop dan

memperkuat hubungan dengan Irlandia Utara serta tetap membuka kerja sama Common Travel Area. e.) pengendalian jumlah imigran yang masuk ke Inggris demi keamanan Inggris dan kesejahteraan masyarakat Inggris. f.) memperkuat perjanjian internasional dengan negara lain diluar Uni Eropa, termasuk perjanjian perdagangan. g.) menjamin Inggris menjadi negara terbaik dalam sektor sains. h.) bekerja sama untuk mengurangi kejahatan terorisme, seperti yang telah Ia lakukan pada saat Johnson menjabat sebagai Walikota London. Dalam hal keamanan ini, Inggris dibawah Boris Johnson akan terus bekerja sama dengan Uni Eropa dalam peningkatan sektor keamanan negara.

Tujuan utama dari kepemimpinan Boris Johnson adalah memastikan bahwa Brexit harus segera selesai dan tidak ada penundaan lagi. Boris Johnson meyakini bahwa hasil referendum Inggris bukanlah sebuah pemungutan suara yang akan mengubah posisi Inggris di Eropa tetapi hal tersebut hanyalah sebuah mosi bahwa pemerintahan Inggris bersama dengan masyarakatnya percaya pada kemampuan nasional Inggris bisa menjalankan kebijakan negaranya secara mandiri.

Dalam sebuah pertemuan di Downstreet pada 10 September 2019, Boris Johnson menyatakan bahwa dirinya optimis akan pembangunan Inggris kedepan dapat terwujud dengan bersatunya kembali masyarakat Inggris seperti dahulu. Johnson sangat optimis bahwa kedepan Inggris dapat melakukan berbagai kerja sama terutama dalam sektor ekonomi tanpa harus keberatan dengan kebijakan Uni Eropa yang membatasi Inggris. Johnson akan menjadikan Inggris negara yang loyal dalam bekerja sama tidak hanya untuk negara Kawasan tetapi untuk negara lain diseluruh dunia, terutama Asia.

Strategi Boris Johnson dalam menyelesaikan Brexit ini salah satunya juga dengan melakukan perombakan kabinet pada masa pemerintahan Theresa May sebelumnya. Perombakan kabinet yang dilakukan oleh Johnson tersebut sempat ditentang oleh masyarakat Inggris, mereka mengatakan bahwa perombakan tersebut dirasa tidak perlu dilakukan. Namun, menurut Johnson, perombakan tersebut tetap harus dilakukan dengan tujuan untuk mendukung rencana dan strateginya dalam penyelesaian Brexit ini, termasuk dengan memecat Menteri Irlandia Utara, Julian Smith. Ia menyingkirkan beberapa menteri senior yang telah dipilih oleh Theresa May, hal tersebut dilakukan oleh Johnson untuk memperkuat posisinya dan menggantikannya dengan beberapa orang yang menurutnya dapat mewujudkan visinya untuk Brexit.

Tawaran dan Alternatif Kebijakan Boris Johnson

Setelah melihat bagaimana persoalan mengenai Brexit, Johnson dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan dagang pasca Brexit. Sebelumnya, Johnson mendapatkan alternatif kebijakan dari Uni Eropa yaitu Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk menyatakan bahwa tidak akan ada pasar tunggal. Namun, jika Inggris tetap menginginkan adanya pasar tunggal setelah Brexit nanti, Inggris harus menerima empat syarat utama untuk tetap bisa berada pada Pasar Tunggal Eropa diantaranya yaitu, kebebasan bergerak untuk barang, modal, jasa layanan, dan tenaga kerja (*CRS Report, 2020*).

Donald Tusk juga menambahkan tidak akan ada negosiasi antara Uni Eropa dan Inggris resmi memberikan permintaan penggunaan artikel 50 kepada Uni Eropa. Boris Johnson kemudian menekankan bahwa prioritasnya adalah untuk mengakhiri yurisdiksi undang-undang Uni Eropa yang berlaku di Inggris dan juga kebebasan bergerak bagi masyarakat Inggris, dan juga untuk menjamin keamanan serta pertahanan nasional Inggris termasuk penghapusan *backstop* pada konflik

Republik Irlandia dan Irlandia Utara.

Donald Tusk juga sempat menyiapkan panduan negosiasi, dimana pedoman tersebut memberikan arahan mengenai Artikel 50 yang memungkinkan negosiasi dibagi kedalam dua fase (*CRS Report, 2020*). Fase pertama, Inggris harus menyetujui komitmen keuangan dan pemberian tunjangan manfaat seumur hidup bagi warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris. Setelah fase pertama tersebut terlewati, maka negosiasi untuk membahas hubungan masa depan antara kedua belah pihak dimulai. Uni Eropa menuntut Inggris supaya membayar tagihan keluarnya Inggris dari keanggotaan yaitu sekitar €60 miliar (*CRS Report, 2020*). Dewan Eropa kemudian memberikan persetujuan kepada negosiatornya untuk memulai pembicaraan Brexit dan mengadopsi arahan perundingan yang telah diberikan sebelumnya.

Diskusi kedua belah pihak antara Inggris dan Uni Eropa itu mengangkat mengenai perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara yang tidak kunjung menemukan solusi sejak lama. Pihak Inggris menginginkan adanya penghapusan *backstop* dan berfokus kepada perlindungan Irlandia Utara sebagai bagian dari wilayah Inggris serta adanya hak perlindungan terhadap warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris (*CRS Report, 2020*). Demi berjalannya proses negosiasi yang mulus dengan Uni Eropa, pihak Boris Johnson memberikan penawaran bahwa dia akan menjamin hak warga negara Uni Eropa yang benar-benar telah terdaftar secara sah dalam sistem internal Inggris.

Pada hasil pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, Perdana Menteri Boris Johnson akhirnya memberikan perincian pada proposal mengenai isu hak tinggal warga negara Uni Eropa, tetapi hal tersebut tetap saja tidak mampu menciptakan kesepakatan resmi antara kedua belah pihak. Setelah itu, pada putaran kedua, Inggris menerbitkan makalah pertama yang menggambarkan mengenai visi Inggris pasca Brexit (*CRS Report, 2020*). Makalah tersebut berfokus mengenai pengaturan perdagangan dan pabean. Boris Johnson menegaskan bahwa Inggris akan meninggalkan sistem Mahkamah Eropa ketika masa transisi Brexit telah selesai, tetapi Johnson tetap menjanjikan bahwa pengadilan Inggris dan Mahkamah Eropa akan tetap saling mengawasi satu sama lain. Namun, Jean C. Juncker melontarkan kritik atas makalah yang diajukan oleh Inggris itu, Juncker menyatakan bahwa tidak ada yang sesuatu yang memuaskan untuk dirundingkan dan Juncker juga menegaskan bahwa pihak Uni Eropa tidak akan memulai negosiasi mengenai hubungan masa depan kedua belah pihak dalam sektor perdagangan apabila isu-isu sebelumnya belum terselesaikan dan tidak mendapat kejelasan.

Pada perundingan ketiga, pihak Inggris dan Uni Eropa mendapatkan kesepakatan bersama mengenai *Common Travel Area (CTA)* Johnson bersama dengan pemerintah Irlandia Utara setuju untuk menjamin kebebasan bergerak bagi warga Uni Eropa antara Irlandia dan Inggris, namun, tetap di adakan adanya pemeriksaan orang (*CRS Report, 2020*). Pemeriksaan tersebut sudah tidak lagi dilakukan di wilayah perbatasan, tetapi dilakukan sebelum keberangkatan di negara-negara masing-masing. Setelah rangkaian perundingan berjalan, Komisi Eropa menerbitkan beberapa makalah perundingan, salah satunya yaitu membahas mengenai perbatasan Irlandia setelah Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, mengenai masalah perbatasan Irlandia tersebut merupakan tanggung jawab Inggris sepenuhnya. Selain itu, perbatasan mengenai Irlandia tidak akan selalu menjadi kerangka untuk hubungan Inggris dan Uni Eropa di masa yang akan datang seperti yang disampaikan dalam pidato Boris Johnson (*BBC, 2019*) :

“The CTA was recognized in the EU-UK negotiations and there is an agreement in the Protocol on Ireland and Northern Ireland, which is an integral part of the Withdrawal Agreement, that Ireland and the UK may continue to make arrangements between themselves relating to the movement of persons between their territories, so the backstop must be removed from withdrawal agreement.”

Sebelumnya, Johnson telah mengumumkan dalam pidatonya mengenai beberapa alternatif kebijakan yang ia hadapi alternatif tersebut datang dari pihak parlemen Inggris (BBC, 2019) :

“And so I’m very pleased that this afternoon that we have completed the biggest trade deal yet, worth £660. A comprehensive Canada style free trade deal, Norway Plus or Common Market, permanent Customs Union between the UK and the EU, and also the Ireland backstop, a deal that will protect jobs across this country. A deal that will allow UK goods and components to be sold without tariffs and without quotas in the EU market. A deal that will if anything should allow our companies and our exporters to do even more business with our European friends. And yet we achieved something that the people of this country instinctively knew was doable. But that they were told was impossible. We have taken back control of laws and our destiny, we have taken back control of every jot and tittle of our regulation.”

Berlarut-larutnya persoalan mengenai negosiasi Brexit antara Inggris dengan Uni Eropa yang dihadapi oleh Boris Johnson tersebut, ia dihadapkan oleh berbagai alternatif kebijakan diantaranya seperti (KPMG Summary, 2020): Pertama, Boris Johnson dihadapkan pada kebijakan yang sebelumnya diambil pada masa pemerintahan Theresa May yang dikenal dengan Perjanjian Penarikan. Perjanjian ini mengartikan bahwa Inggris harus mengikuti aturan serikat pabean Uni Eropa dan Pasar Tunggal, sementara Inggris tidak memiliki suara dalam keduanya karena Inggris telah keluar dari keanggotaan. Perjanjian ini juga mengatur mengenai Perjanjian *backstop* Irlandia Utara yang sangat kontroversial dan tidak kunjung menemukan jalan keluar. *Backstop* dianggap kontroversial karena Uni Eropa dalam kebijakan *backstop* ini adalah Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari keanggotaan *European Customs Union*, termasuk dalam *single market* dan *Value Added Tax*. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi Irlandia Utara dan tidak berlaku di wilayah Inggris lainnya. Apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan maka *custom* dan *regulatory border* akan ditarik ke tengah Laut Irlandia. Barang yang masuk ke Irlandia Utara dari berbagai wilayah di Inggris harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan standar Uni Eropa.

Kedua, *Norway Plus* atau *Common Market 2.0*. Kebijakan ini menjelaskan dimana Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa tetapi masih tetap sangat erat hubungannya dengan Uni Eropa. Namun, dengan adanya kesepakatan ini dapat menghindari adanya pengaturan *hard border* bea cukai antara Inggris dan Uni Eropa di wilayah Irlandia. Dengan kesepakatan ini juga, Inggris akan bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) yang akan memungkinkan Inggris untuk melakukan dagang dengan Uni Eropa dengan persyaratan yang sama ketika Inggris masih bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa. Melalui EFTA, Inggris dipastikan juga akan melanjutkan keanggotaannya dalam wilayah Ekonomi

Eropa (EEA), yang berarti akan mempertahankan akses pasar tunggal Uni Eropa. Namun, dengan adanya kesepakatan ini, sektor industri Inggris akan terganggu. Selain itu, kesepakatan ini juga akan membuat Inggris meninggalkan Pengadilan Eropa (ECJ) dalam semua bidang.

Ketiga, Serikat Pabean Permanen. Serikat pabean pada dasarnya merupakan kesepakatan perdagangan bebas antara sejumlah negara yang setuju untuk berbagi tarif eksternal bersama. Artinya, tidak ada pemeriksaan pabean di wilayah perbatasan. Tetapi, karena Uni Eropa merupakan satu blok perdagangan besar maka Uni Eropa memiliki aturan eksternal tersendiri yang harus dijalankan oleh para anggotanya. Jadi, jika Inggris masih tergabung dalam serikat pabean, maka hal tersebut akan memudahkan Inggris dalam melakukan kerja sama perdagangan. Tetapi, Inggris masih harus tergabung dengan peraturan Uni Eropa dalam hal kepabeanan.

Keempat, Brexit Tanpa Kesepakatan. Kebijakan ini sempat dilontarkan oleh Johnson pada awal menjabat sebagai perdana menteri Inggris, Inggris akan berdagang dengan dunia dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan akan keluar dari semua Lembaga Uni Eropa. Dengan keluarnya Inggris dari aturan Uni Eropa, maka Inggris akan dengan leluasa untuk melakukan Kerjasama luar negeri dengan negara manapun tanpa harus dipersulit dengan kebijakan Uni Eropa. Disisi lain, jika Inggris keluar tanpa kesepakatan, maka hal tersebut akan mempersulit jalannya kerja sama antar negara-negara di Eropa dimasa yang akan datang. Kelima, Perjanjian Perdagangan Bebas Gaya Kanada. Perjanjian ini pada dasarnya mengatur tentang perdagangan yang lebih longgar yang menghilangkan banyak hambatan antara negara-negara di Kawasan Eropa dan Kanada. Namun, karena Kanada bukan anggota dari serikat pabean atau pasar tunggal, pemeriksaan pabean masih tetap dilakukan.

Keputusan Perjanjian Dagang Inggris dengan Uni Eropa Masa Pemerintahan Boris Johnson

Boris Johnson sebagai perdana menteri Inggris dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Boris Johnson sebagai perdana menteri yang cukup ambisius dan rasional karena Ia merupakan seorang Brexit garis keras semenjak Ia menjabat menjadi walikota London. Oleh karenanya, Ia sangat rasional dengan situasi terkait persoalan Brexit ini, seperti ketika proposal Brexitnya ditolak oleh Uni Eropa. Delapan poin kesepakatan yang telah diambil oleh Johnson tersebut akhirnya berhasil dijadikan sebuah kebijakan resmi pasca Brexit dibawah kepemimpinannya. Delapan poin kebijakan tersebut diambil oleh Boris Johnson setelah proposalnya ditolak sebanyak tiga kali oleh Parlemen Inggris, oleh karena itu, Ia dapat menyimpulkan kesepakatan perdagangan pasca Brexit melalui delapan poin kesepakatan tersebut seperti dalam pidatonya (*The Telegraph*, 2020):

“From 1st January, we are outside the customs union, and outside the single market, British laws will be made solely by the British Parliament, interpreted by UK judges sitting in UK courts. We will be able to set our own standards, to innovate in the way that we want to originate new frameworks for the sectors in which this country leads to the world. We will be able to decide how and where we are going to stimulate new jobs and new hope. So I decided to chose the new agreements ; tariff deal, dispute, fishery deal, subsidy, security, customs, entry permit document, and also about the backstop. Everything I decided for the better UK in the future.”

Johnson telah dihadapkan oleh berbagai alternatif kebijakan, namun, dalam pidatonya pada 24 September 2020, Ia telah memperoleh kesepakatan baru dari hasil perundingan antara Inggris dan Uni Eropa pasca persoalan Brexit ini usai diantaranya yaitu dengan delapan poin penting (*Instinct Partners, 2020*) : 1.) kesepakatan tarif. Kesepakatan ini tidak mengenakan tarif atau kuota hampir pada semua barang yang diproduksi di Inggris dan Uni Eropa yang telah diperdagangkan oleh kedua belah pihak (*Instinct Partners, 2020*). Namun, ekspor Inggris harus mematuhi standar kesehatan dan keselamatan Uni Eropa beserta dengan adanya peraturan ketat yang mengatur produk yang dibuat dengan suku cadang dari luar Uni Eropa atau Inggris. 2.) Sengketa. Inggris akan menolak adanya peran apapun yang dilakukan di Pengadilan Uni Eropa, sehingga, sengketa akan ditangani oleh WTO atau pengadilan arbitrase *ad hoc* (*Instinct Partners, 2020*). 3.) kesepakatan mengenai perikanan. Kapal-kapal nelayan Uni Eropa yang selama ini melaut di perairan Inggris yang sangat kaya akan hasil laut harus melepas kuota mereka sebesar 25 persen. 4.) kesepakatan subsidi. Inggris akan membentuk otoritas independent untuk memutuskan UU persaingan sebagai tandingan dari peran yang diemban oleh Komisi Eropa yaitu peraturan mengenai *level playing field* yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah perusahaan Inggris mengakali para rival di Eropa dengan subsidi maupun standar tenaga kerja yang tidak adil (*Instinct Partners, 2020*). 5.) kesepakatan keamanan. Kedua belah pihak akan tetap berbagi data DNA, sidik jari, dan detail penumpang seperti yang dulu dilakukan sebelum Brexit (*Instinct Partners, 2020*). Inggris juga akan tetap bekerjasama dengan Europol dalam hal keamanan. 6.) Bea Cukai. Birokrasi baru diterapkan untuk bisnis, impor, dan ekspor diseluruh wilayah (*Instinct Partners, 2020*). barang-barang yang masuk ke Inggris akan diperiksa secara ketat, begitu juga jika Inggris ke negara-negara Eropa lainnya. 7.) kesepakatan mengenai dokumen izin masuk. Masyarakat Inggris dan masyarakat dari negara Eropa lainnya tidak bebas lagi untuk tinggal dan bekerja diantara kedua belah pihak (*Instinct Partners, 2020*). Kesepakatan ini juga termasuk ketentuan visa bagi para pelancong dengan urusan bisnis. Begitupun dengan para musisi atau artist yang akan menggelar event pertunjukan mereka memerlukan visa. 8.) kesepakatan mengenai *backstop*. Persoalan mengenai *backstop* pada masa Boris Johnson telah dihapuskan. Johnson juga menetapkan bahwa pembangunan tembok pembatas antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia ditiadakan, Republik Irlandia adalah wilayah yang masih menjadi bagian dari keanggotaan di Uni Eropa, sedangkan Irlandia Utara masih tetap menjadi bagian dari wilayah Inggris. Itu semua dilakukan oleh Johnson demi kelancaran sistem perdagangan antar wilayah.

Walaupun dalam proses negosiasi perjanjian dagang antara Inggris dan Uni Eropa pada masa Boris Johnson sempat berjalan tidak mulus karena sempat adanya penolakan proposal sebanyak tiga kali oleh Parlemen Inggris, semua hal tersebut dalam terselesaikan ditangan Boris Johnson melalui perumusan kebijakan yang dinamakan “Perjanjian Dagang”. Semua kesepakatan yang telah diambil oleh Johnson pasca Brexit tersebut mayoritas berfokus pada sektor perdagangan. Sektor perdagangan dinilai menjadi hal yang cukup rasional bagi Johnson saat ini. Berbagai kesepakatan yang cukup rasional telah diambil oleh Johnson sebagai upaya untuk menanggulangi keadaan ekonomi nasional Inggris pasca Brexit, seperti (*KPMG Summary, 2020*) : a.) turunnya perdagangan Inggris dengan Uni Eropa yang disebabkan oleh munculnya *tariff* dan *non-tariff barriers* yang lebih tinggi, sehingga akan menurunkan pendapatan Inggris sebesar 2,3%. b.) turunnya

investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Inggris, karena selama ini sebanyak 50% FDI Inggris berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa. c.) turunnya produktivitas Inggris dalam pengembangan ekonomi nasionalnya. d.) hilangnya tenaga kerja muda yang terdidik dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, hal tersebut cukup menjadi masalah bagi Inggris karena angka kelahiran di Inggris sangat rendah dan menyebabkan kurangnya angkatan kerja. e.) turunnya standar hidup di Inggris, hal tersebut dikarenakan naiknya harga barang dan jasa seperti makanan, transportasi, pakaian. f.) Johnson sudah dapat memperkirakan risiko terburuk jika Inggris tak kunjung menyepakati perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yaitu turunnya nilai poundsterling. Nilai mata uang Inggris tersebut akan anjlok secara drastis terhadap mata uang dolla Amerika. g.) sikap rasional Johnson juga ditunjukkan melalui adanya perjanjian dagang ini, jika Inggris tidak kunjung melakukan kesepakatan dagang bersama Uni Eropa, maka Inggris akan kehilangan tarif nol dan akses tanpa kuota ke Pasar Tunggal Eropa. Hal tersebut memicu munculnya hambatan-hambatan non tarif dan konsumen serta para pelaku bisnis Inggris akan menghadapi pada kenaikan-kenaikan harga. h.) jika tidak ada kesepakatan perdagangan yang jelas maka bisa dipastikan bahwa Irlandia Utara akan menjadi akses untuk bergabung dalam pasar tunggal Uni Eropa, sehingga potensi akan adanya *hard border* akan terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Charles Kegley dan Shannon Blanton bahwa tindakan rasional yang diambil Johnson dipicu dengan ketidakpuasan mereka terhadap bagaimana demokrasi yang diterapkan di Uni Eropa, sehingga lebih baik menjalin kerjasama ekonomi daripada harus bergabung menjadi keanggotaan secara penuh yang sangat memberatkan Inggris. Setelah meninjau permasalahan Brexit, Johnson memiliki alternatif kebijakan untuk menyelesaikan persoalan negosiasi tersebut diantaranya seperti, perjanjian penarikan masa Theresa May, Norway Plus atau Common Market 2.0, Serikat Pabean Permanen, Brexit Tanpa Kesepakatan, Perjanjian Perdagangan Bebas Gaya Kanada. Namun, menurut Johnson itu semua adalah hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu Ia merumuskan suatu kesepakatan perjanjian dagang yang Ia anggap rasional dan menguntungkan Inggris dan juga Uni Eropa pada masa yang akan datang yaitu, kesepakatan tariff, kesepakatan sengketa, kesepakatan mengenai perikanan, kesepakatan subsidi, kesepakatan keamanan, bea cukai, dokumen izin masuk, dan penghapusan backstop.

Daftar Pustaka

- Andrias Darmayati, “*Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit*”, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol 8 No.1, 2018, hal 10.
- Boris Johnson first speech as Prime Minister on 24 July 2019*. Diakses dari BBC, <https://www.youtube.com/watch?v=6jfSAWCHRts>.
- Boris Johnson’s Brexit Trade Deal speech in full: *We Have Taken Back Control of Laws and Our Destiny*. Dikutip dari The Telegraph <https://www.youtube.com/watch?v=4Sn4x147Tm8&t=287s>.
- Boris Johnson’s Brexit Trade Deal speech in full: *We Have Taken Back Control of Laws and Our Destiny*. Dikutip dari The Telegraph <https://www.youtube.com/watch?v=4Sn4x147Tm8&t=287s>.
- Congressional Research Service. *Brexit: Status and Outlook*. CRS Report Prepared for Members and Committees of Congress, 13 Februari 2020, <https://crsreports.congress.gov>.
- Dr John Mcmanus. *Brexit Threats and Opportunities for People and Business*. Journal Management Services Summer 2017.
- Francisca & Trihastuti, “*Implikasi Referendum Brexit terhadap Kebijakan Imigrasi United Kingdom*”. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2, 2017, hal 1-2.
- Instinctif Partners, *The Johnson Government’s Policy Priorities*. Februari 2020.
- Khairul Munzilin dan Ali Muhammad, *Brexit: Eurosceptic Victory In british Referendum In Term Of Britain Membership Of European Union*. Jurnal Sosial Politik Humaniora. Vol. 5 No. 1, 2017, hal. 10.
- KPMG Summary and Analysis, *Brexit Transition Phase: Actions to Take in 2020*, February 2020.
- Mashita Dewi Tidore, 2017, *Dinamika Referendum Inggris Di Uni Eropa Studi Kasus: Referendum Brexit*, Skripsi, Makassar, Universitas Hassanudin, Hal. 9-12.
- Nanda & Permata. 2017. *Brexit: Pelajaran Bagi ASEAN*. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.6, No.1. FISIP, Universitas Brawijaya.